

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Muhammad Raihan Fadhilsyah¹, M Husni Mubarak², Rosy Armaini^{3*}

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya

* E-mail Korespondensi: rosyarmaini@polsri.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 12-08-2025

Revision: 16-08-2025

Published: 17-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1129

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Data sekunder berupa ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI dan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023 di akses melalui laman e-PPID <http://www.bpk.go.id>. Metode pada riset ialah kuantitatif regresi data panel *Random Effect Model* (REM) dengan bantuan software e-views 13. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel temuan audit berpengaruh signifikan dengan nilai t tabel 5,1753 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Variabel ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan dengan nilai t tabel -4,4038 dan nilai probabilitas 0,0001. Variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan dengan nilai t tabel 0,2486 dan nilai probabilitas sebesar 0,8047. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,5604, nilai f hitung sebesar 12,8249 dan probabilitas f sebesar 0,0000. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kata Kunci: belanja daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, regresi data panel temuan audit, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

A B S T R A C T

This study aims to analyze the influence of audit findings, dependence on the central government, and regional spending on the completion rate of follow-up on audit recommendations by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) in provincial governments on the island of Sumatra. Secondary data in the form of BPK RI audit summaries and financial reports of provincial governments in Sumatra from 2019 to 2023 are accessed through the e-PPID portal at <http://www.bpk.go.id>. The

Acknowledgment

method applied is quantitative panel data regression using the Random Effect Model (REM) with the help of E-Views 13 software. The results show that audit findings have a significant effect with a t-statistic value of 5.1753 and a probability of 0.000. Dependence on the central government also shows a significant effect with a t-statistic of -4.4038 and a probability of 0.0001. Regional spending does not have a significant effect with a t-statistic of 0.2486 and a probability of 0.8047. The coefficient of determination is 0.5604, the F-statistic is 12.8249, and the F-probability is 0.0000. Simultaneously, all three variables significantly influence the follow-up of audit findings.

Key word: *Regional Expenditure, Dependence on Central Government, Panel Data Regression, Audit Findings, Follow-up on BPK Audit Recommendations*

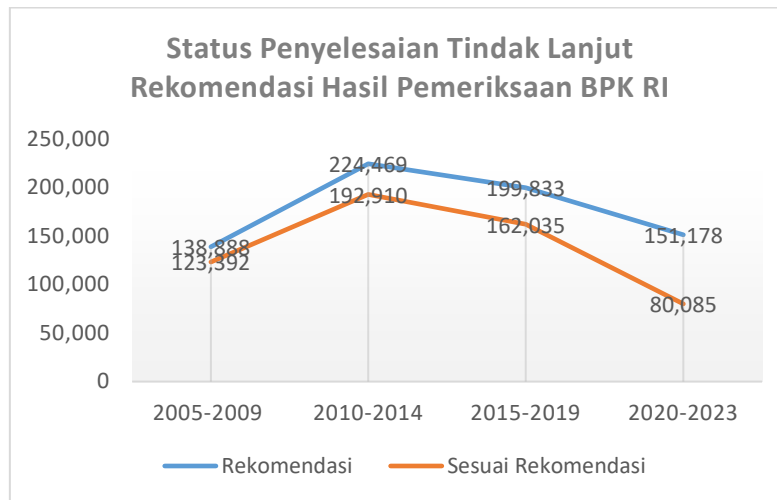
© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pemerintah dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan, disertai dengan sikap terbuka dan bertanggung jawab. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan organisasi dan pengguna anggaran/ barang untuk menyusun laporan akuntabilitas keuangan dan kinerja atas penggunaan anggaran atau barang. Salah satu instrumen utama pelaporan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana diatur dalam PP No. 8 Tahun 2006. LKPD harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP No. 71 Tahun 2010, guna menghasilkan laporan berkualitas yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 5 UUD 1945, audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh lembaga yang bebas dan tidak memihak, untuk menjamin kepatuhan terhadap SAP. Untuk itu, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006. BPK adalah lembaga independen yang bertugas mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai standar yang berlaku.

Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik diperkuat dengan adanya suatu pelaporan dari hasil audit dan rekomendasi yang kemudian dilaporkan kepada entitas perwakilan. Informasi mengenai status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK semester 2 Tahun 2023 dapat dilihat secara lebih terperinci dalam

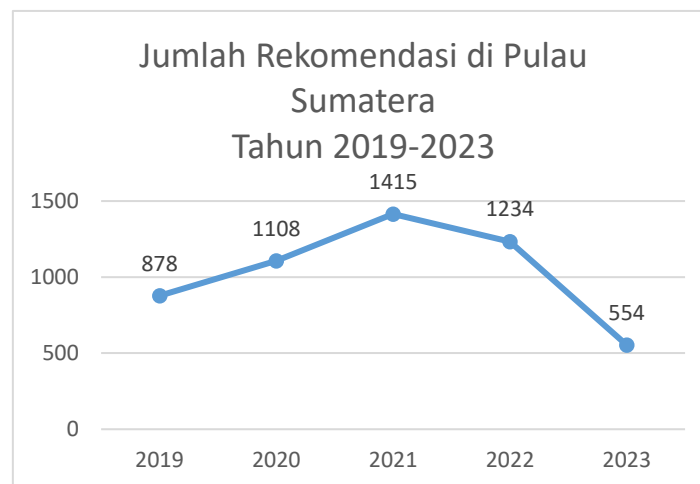
gambar 1 yang disajikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK Semester 2 Tahun 2023 .



Gambar 1. Grafik Status Penyelesaian TLRHP

Sumber: ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester 2 (2025)

Pada rentang waktu 2005-2009, sebanyak 88,9% penyelesaian sedangkan pada periode berikutnya terjadi penurunan yang signifikan dalam penyelesaian rekomendasi. Berdasarkan status penyelesaian rekomendasi di periode-periode tersebut, tingkat rekomendasi yang sesuai rekomendasi terjadi penurunan yang cukup signifikan.

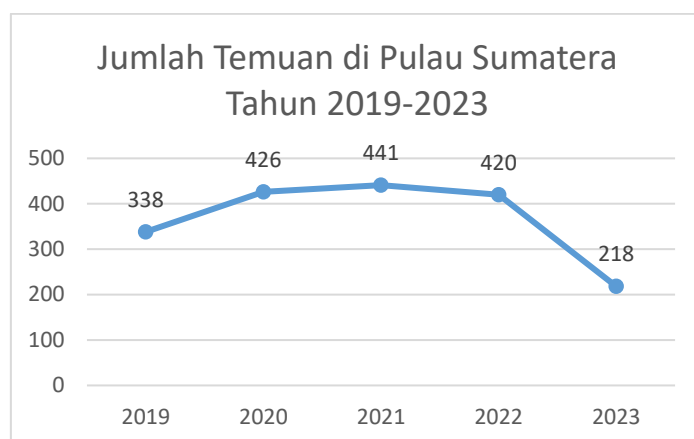


Gambar 2. Total Rekomendasi BPK RI Pada Pulau Sumatera Di Indonesia Tahun 2019=2023

Sumber: Daftar rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 (2025)

Data tabel tersebut menjabarkan bahwa rekomendasi di Pemprov pulau sumatera mengalami kenaikan signifikan pada 2019-2021 dan terjadi penurunan pada 2022-2023. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 dengan tegas menjabarkan jika pemangku kepentingan terkait harus untuk secara sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan itu tidak sejalan dengan hasil serta fakta dalam data IHPS Semester 2 Tahun 2023.

Satu diantara komponen yang terpengaruh TLRHP ialah temuan audit. Di Pulau Sumatera temuan audit secara signifikan meningkat dari tahun 2019-2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022-2023. Data dapat dilihat secara lebih terperinci dalam gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Total temuan BPK RI pada Pulau Sumatera Di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Daftar rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah ikhtisat hasil pemeriksaan semester 2 (2025)

Pentingnya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah semakin diakui sebagai faktor yang menentukan dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa opini audit BPK berperan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah (Kusuma & Kurnasih, 2024)

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengelolaan pendapatan asli daerah dan hasil audit yang diterima dari BPK, yang memberikan dampak langsung terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran daerah (Mega & Saring, 2025)

Menurut riset Artha, Dewata, & Nurhasanah (2024), jumlah OPD berdampak positif pada derajat tindak lanjut rekomendasi hasil BPK, dan temuan pemeriksaan berdampak negatif

terhadap derajat penyelesaian nya. Penelitian Puspitasari & Ratmon (2017) hal terpengaruh TLRHP diteliti dalam studi ini. SPI dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan adalah dua kategori hasil audit dalam studi ini.

Tindak lanjut rekomendasi BPK diduga dipengaruhi oleh ketergantungan pemda pada pemerintah pusat, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) . Studi Harlin, Nadirsyah, & Meutia (2023) menunjukkan bahwa ketergantungan tersebut meningkatkan pelaksanaan TLRHP. Namun, penelitian Kusuma & Kurnasih (2024), serta Puspitasari & Ratmono (2017) justru menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ketergantungan pada pusat dan pelaksanaan TLRHP.

Belanja daerah diduga berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Menurut Saputri & Kurnia dalam (Ghanniya, 2023) belanja daerah digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintah. Namun, jika realisasinya melebihi anggaran, hal ini berpotensi memicu temuan BPK dan memengaruhi tindak lanjutnya. Meski demikian, penelitian Deswira (2024) menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP.

Teori Keagenan oleh Michael C. Jensen & William H. Meckling menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat) yang memberikan wewenang kepada agen (pemerintah daerah-/DPR/DPRD) untuk mengelola kepentingan mereka, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah melalui LKPD. Masyarakat sebagai sumber pendanaan memiliki harapan agar pemda mampu mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan publik Sulistyanto dalam Akbar (2022). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan, mengoptimalkan pengeluaran, serta menindaklanjuti TLRHP BPK RI secara bertanggung jawab. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh temuan audit terhadap TLRHP. Hasil penelitian Ghanniya (2023) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap TLRHP BPK RI. Sedangkan hasil penelitian Artha, Dewata, & Nurhasanah (2024) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap TLRHP. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap TLRHP. Hasil penelitian Kusumarini & Respati (2022) dan Puspitasari & Ratmono (2017) menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan saran hasil

audit BPK RI. Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh belanja daerah terhadap TLRHP. Hasil penelitian Ghanniya (2023) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap TLRHP.

Berdasarkan fenomena data, dapat disimpulkan jika tidak semua hipotesis sejalan dengan teori yang ada. Perbedaan utama terletak pada pemilihan objek penelitian, yaitu Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera untuk periode tahun anggaran 2019-2023 dan menggunakan bantuan *software Eviews 13 for Windows*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera, Untuk menyelidiki pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap TLRHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera, Untuk menyelidiki pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK RI pada Pemprov di Pulau Sumatera, Untuk menyelidiki pengaruh Temuan Audit, Ketergantungan pada pempus dan Belanja Daerah pada Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK RI di Pemprov Provinsi Pulau Sumatera.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai audit sektor publik. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelesaian TLRHP BPK RI. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh temuan audit, ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data pada riset ialah dari sumber data sekunder yang didapatkan pada laman e-PPID <http://www/bpk.go.id>. Teknik analisis data digunakan pada riset menggunakan *software Econometric Views (Eviews)* versi 13, dengan pengujian sebagai bahwasannya, Analisis Statistik Deskriptif, ialah deskripsi data disediakan oleh statistik deskriptif memakai serangkaian ukuran numerik, seperti rata-rata, deviasi standar, varians, maksimum, minimum, total, rentang, kurtosis, serta skewness (kemiringan distribusi) (Ghozali, 2018) Pemilihan Model Regresi Data Panel, *Common Effect Model* (CEM) , *Fixed Effect Model* (FEM) , dan *Random Effect Model* (REM) adalah tiga kategori model regresi data panel. Tiga uji berbeda dipakai demi mengidentifikasi model tepat : uji multipler Lagrange, uji

Hausman, dan uji Chow Widarjono dalam Iqbal (2015). Pengujian Asumsi Klasik, meliputi pengujian autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Analisis Regresi Data Panel, Unit penampang yang sama akan diamati atau diukur pada berbagai periode dalam studi regresi berganda data panel, yang menggabungkan data penampang dan data deret waktu (Sugiyono, 2019).

Hipotesis :

H¹: Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

H²: Ketertergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

H³: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pengujian Hipotesis, Nilai probabilitas dan nilai statistik-t menunjukkan pengujian hipotesis. Dengan menggunakan statistik statistik untuk pengujian hipotesis, nilai statistik-t adalah 1,67866 dan alpha-nya 5%. Oleh karena itu, ketika nilai probabilitas kurang 0,05 dan statistik-t melebihi dari 1,67866, hipotesis ditolak dan Ha diterima.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif atas data temuan audit, ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah terhadap TLRHP adalah:

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0,43	3,57	29,85	0,65
Median	0,41	3,58	25,72	0,66
Maximum	1,03	4,47	91,82	0,68
Minimum	-0,29	2,71	11,59	0,58
Std. Dev.	0,29	0,38	17,63	0,02
Observations	50	50	50	50

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Berdasarkan tabel 5: Nilai *mean*, *median*, *maximum*, *minimum*, dan *standar deviation*, Variabel TLRHP (Y) menghasilkan mean 0,43, median 0,41. Angka minimum Y tercatat senilai -0,29, sedangkan nilai maksimum mencapai 1,03. Standar deviasi sebesar 0,29 menunjukkan bahwa sebaran data Y berada pada tingkat moderat; tidak begitu tinggi tapi tidak begitu rendah juga. Variabel Temuan Audit (X1) mempunyai mean senilai 3,57 pada median

1396

3,56. Nilai minimum sebesar 2,71 dan maksimum 4,47. Standar deviasi senilai 0,38 menampilkan ada jenis yang terbilang tinggi pada jumlah temuan audit. Variabel Ketergantungan pada pemerintah pusat (X2) mempunyai mean senilai 29,85 juga median 25,72. Rentang nilai X2 cukup lebar, dengan minimum 11,59 dan maksimum 91,82. Standar deviasi sebesar 17,63 mengindikasikan bahwa terdapat fluktuasi ketergantungan fiskal yang cukup moderat ditengah satu daerah pada daerah lainnya. Variabel Belanja Daerah (X3) menunjukkan mean senilai 0,65 dengan median senilai 0,66. Nilai minimum pada X3 adalah 0,58, sedangkan maksimum mencapai 0,68. Standar deviasi sebesar 4,36 mengindikasikan tingkat penyebaran data yang cukup moderat hingga tinggi. penyebaran data yang moderat di sekitar nilai rata-ratanya yang negatif.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Pengujian Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	0.179933	(9,37)	0.9950
Cross-section Chi-square	2.141837	9	0.9890

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Perolehan uji chow menampilkan hasil *probability cross section Chi-square* senilai $0,9890 > 0,05$, dimana H_0 diterima, sehingga model terbaik ialah CEM.

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Pengujian Hausman

Correlated Random Effect – Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f.	Prob.
Cross-section random	0,1674206	3	0,9827

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Hasil uji Hausman telah menampilkan hasil *probability cross section REM* ialah $0,9827 > 0,05$, dimana menunjukkan bahwa H_0 diterima.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Pengujian Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Test for Random Effects			
Null hypotheses: No effect			
Alternative hypotheses: Two-sided (breusch-Pagan) and one-side (all others) alternatives.			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	3.984920 (0.0459)	0.025093 (0.8741)	4.010014 (0.0452)
Honda	-1.996226 (0.9770)	0.158410 (0.4371)	1.299532 (0.9031)
King-Wu	-1.996226 (0.9770)	0.158410 (0.4371)	0.975502 (0.8353)
Standardized Honda	-1.803127 (0.9643)	0.670517 (0.2513)	4.450243 (1.0000)
Standardized King-Wu	-1.803127 (0.9643)	0.670517 (0.2513)	3.907590 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.025093 (0.6839)

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

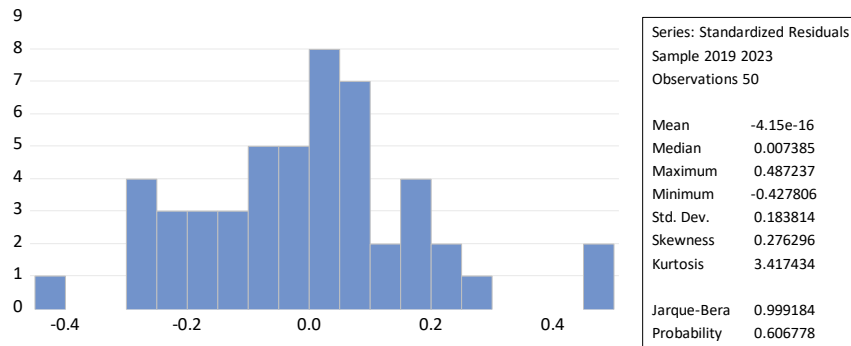
Nilai uji *Lagrange Multiplier* mengartikan jika cross section Breusch-pangan memiliki nilai signifikansi $0,0459 < 0,05$, berarti H1 diterima, sehingga model REM paling optimal diadopsi.

Berdasarkan uji chow, uji hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* diperoleh bahwa Uji Chow, penggunaan model tepat yakni CEM. Uji Hausman, penggunaan model tepat yakni REM. Uji *Lagrange Multiplier*, penggunaan bentuk optimal ialah REM. Dalam uji pengali Hausman dan *Lagrange Multiplier*, REM dipilih. Namun, hanya dalam uji Chow, CEM dipilih. Sebab itulah dikatakan bahwa REM paling tepat dari ketiga model regresi data panel.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menilai kenormalan data; bila *probability* melebihi 0,05, bentuk residual dianggap tipikal (Black & Kan, 2019).



Gambar 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Sumber: Output data diolah dengan *Eviews 13* (2025)

Berlandaskan uji normalitas dalam riset, nilai *probability* senilai 0,6068, artinya residual model berdistribusi normal dan penyebaran residual yang berbentuk menyerupai lonceng atau *bell-shaped curve* meskipun sedikit condong ke kiri (Black & Kan, 2019).

Uji Multikolinearitas

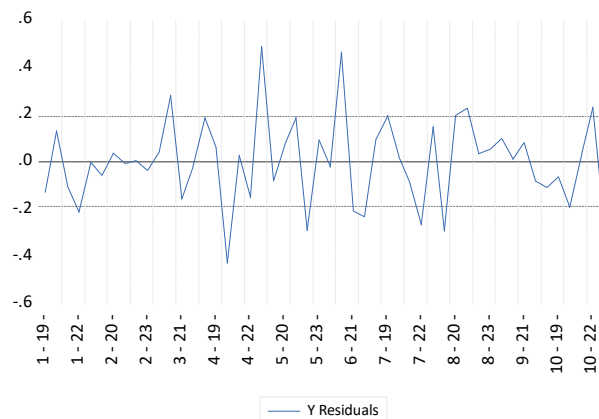
Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.285604	-0.241462
X2	-0.285604	1.000000	0.229242
X3	-0.241462	0.229242	1.000000

Sumber: output data diolah dengan *Eviews 13* (2025)

Koefisien korelasi ditengah X1 serta X2 ialah $-0,2856 < 0,90$. Koefisien korelasi antara X1 bersama X3 adalah $-0,2415 < 0,90$. Koefisien korelasi X2 bersama X3 adalah $0,2293 < 0,90$. Menurut data, uji multikolinearitas berhasil dilewati oleh koefisien korelasi setiap variabel.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.

Sumber: Output data diolah dengan *Eviews 13* (2025)

Pengujian heteroskedastisitas riset menampilkan jika residu tidak melebihi batas 500 juga -500, menunjukkan jika varians residu selaras. Membuat uji heteroskedastisitas dinyatakan lulus atau tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan penentuan model regresi data panel, Efek Model Acak (REM) menjadi model cocok. REM mengasumsikan bahwa perbedaan antar entitas (seperti perusahaan, wilayah, atau negara) tidak bersifat tetap dan dapat dimodelkan sebagai bagian dari komponen error secara acak (Gujarati, 2021).

Tabel 6. Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/07/25 Time: 16:33				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.951945	0.870849	-1.093122	0.2800
X1	0.390615	0.075477	5.175282	0.0000
X2	-0.007171	0.001628	-4.403833	0.0001
X3	0.298710	1.201329	0.2486501	0.8047
R-squared	0.587351	Mean dependent var		0.419992
Adjusted squared	0.560439	S.D. dependent var		0.286146
S.E. of regression	0.189713	Akaike info criterion		-
				0.409988

Sum squared resid	1.655589	Schwarz criterion	-0.257027
Log likelihood	14.24972	Hannan-Quinn criter.	-0.351740
F-statistic	21.82496	Durbin-Watson stat	2.567737
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Model estimasi diperoleh melalui *Random Effect Model* bisa dinyatakan, tergantung pada hasil regresi *Common Effect Model* berikut :

$$Y = -0.9519 + 0.3906 \cdot X_1 - 0.0072 \cdot X_2 + 0.2987 \cdot X_3 + \varepsilon$$

TLRHP memiliki probabilitas senilai 0,28 dan nilai konstanta senilai -0,9519, artinya bahwa tanpa adanya nilai variabel bebas, maka diketahui bahwa akan berpengaruh terhadap variabel terikat TLRHP. Nilai Koefisien Temuan Audit (X_1) senilai 0,3906 di hasil positif. Artinya bahwa setiap penurunan variabel Temuan Audit sebesar 1% maka akan menyebabkan variabel terikat (dependen) TLRHP mengalami peningkatan sebesar 39,06% pada asumsi variabel lain nilainya pasti. Nilai Koefisien Ketergantungan pada pemerintah pusat (X_2) senilai 0,0072 berada di negatif. Ini menyimpulkan jika bersama dengan asumsi semua faktor lain tetap konstan, variabel dependen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit akan turun sebesar 0,72% pada tiap kenaikan 1% di variabel Ketergantungan pada pemerintah pusat. Nilai Koefisien belanja daerah (X_3) senilai 0,2987 yang bernilai positif. Artinya jika masing masing variabel belanja daerah naik sebesar 1% maka akan menyebabkan variabel terikat (dependen) TLRHP terjadi penurunan sebesar 29,87% pada asumsi variabel lain hasilnya tetap.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel berikut menunjukkan hasil uji Koefisien Determinasi.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.587351
Adjusted R-squared	0.560439

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Nilai Adjusted *R-squared* menunjukkan angka 0,5605 atau 56,06% sedangkan sisanya disebabkan karena faktor lain dimana tidak terdapat dalam riset ini. Artinya variabel terikat terpengaruh variabel bebas Temuan Audit, Ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah sebesar 56,06%.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji F

F-statistic	21.82496
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Dapat diketahui bahwa nilai F-statistic sebesar $21,8250 > 3,20$ dan hasil *probability* senilai $0,0000 < 0,05$. Menjadikan di tingkat $\alpha = 0,05$, H_1 diterima berarti Temuan Audit, Ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah secara simultan berdampak signifikan pada TLRHP.

Uji T

Nilai statistik-t serta nilai *probability* dalam studi ini menunjukkan uji-t. Jika nilai statistik-t melebihi tabel-t juga nilai *probability* dibawah 0,05, bisa diartikan jika variabel bebas memengaruhi variabel terikat atau dugaan diterima.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.951945	0.870849	-1.093122	0.2800
X1	0.390615	0.075477	5.175282	0.0000
X2	-0.007171	0.001628	-4.403833	0.0001
X3	0.298710	1.201329	0.2486501	0.8047

Sumber: output data diolah dengan Eviews 13 (2025)

H2 diterima menunjukkan bahwa temuan audit memiliki dampak nyata pada TLRHP, sesuai dengan nilai uji di atas dimana menampilkan variabel temuan audit (X1) memiliki nilai t hitung senilai $5,1753 > 1,67866$ dan nilai *probability* senilai $0,0000 < 0,05$. Nilai di bawah ambang batas signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) ditunjukkan oleh nilai signifikansi tersebut. Bisa diputuskan bahwa hipotesis 2 (H2) diterima. H3 Variabel ketergantungan pada pemerintah pusat (X2) terdapat t-hitung senilai $4,4038 > 1,67866$ serta nilai *probability* senilai $0,0001 < 0,05$ H2 diterima dimana Ketergantungan pada pemerintah pusat berdampak signifikan pada TLRHP. Hipotesis 3 (H3) terbukti diterima. H4 ditolak dan H0 diterima sebab variabel Belanja Daerah (X3) memiliki nilai t hitung senilai $0,2486 < 1,67866$ dan nilai *probability* senilai

$0,80047 > 0,05$, bisa diartikan jika Belanja Daerah tidak berpengaruh nyata terhadap TLRHP. Bisa diketahui jika dugaan 4 (H_4) ditolak dan dugaan 0 (H_0) diterima.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap TLRHP Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil riset, variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit secara parsial dipengaruhi secara signifikan oleh variabel temuan audit itu sendiri. Dengan demikian, bisa diputuskan bahwa hipotesis 2 (H_2) diterima. Dengan demikian, semakin banyak temuan audit, maka semakin banyak pula pemda di Pulau Sumatera yang akan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

Teori *Agency* atau Keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi amanah, seperti rakyat melalui DPR/DPRD) dan *agent* (pengelola sumber daya, yaitu pemerintah/organisasi publik). Menurut Jensen & Meckling, ketika ada ketidaksesuaian kepentingan antara keduanya, dibutuhkan mekanisme pengawasan (audit) untuk mengurangi asimetri informasi. Temuan audit adalah hasil evaluasi objektif auditor terhadap penyimpangan, ketidaksesuaian, atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tindak lanjut rekomendasi hasil merupakan tindak lanjut atau jawaban atas temuan audit. Semakin banyak dan serius temuan audit yang disampaikan oleh BPK maka tekanan dari lembaga pengawas dan masyarakat meningkat, dan pemerintah daerah akan lebih mendorong untuk segera menindaklanjuti. Oleh karena itu, hubungan antara temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil bersifat langsung, signifikan, dan dapat diukur.

Penelitian ini relevan dengan temuan Rahmi & Ariani (2020), menyatakan bahwa temuan audit mendorong peningkatan tindak lanjut secara signifikan, karena entitas pemerintah daerah merasa terdorong untuk menindaklanjuti rekomendasi guna memperbaiki opini audit. Semakin besar jumlah temuan, maka semakin besar tuntutan dan tekanan untuk menyelesaikan tindak lanjut, menjadikan tindak lanjut sebagai respon langsung terhadap temuan. Hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun 2024 menunjukkan bahwa opini audit yang diberikan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Deswira, 2024)

Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap TLRHP Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Temuan riset mengartikan jika variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dipengaruhi secara signifikan dan parsial secara negatif oleh variabel ketergantungan pada pemerin-

tah pusat. Di Pulau Sumatra, pengaruh negatif menunjukkan jika peningkatan ketergantungan pada Pempus akan mengakibatkan penurunan tindak lanjut rekomendasi hasil audit di pemprov.

Teori *resource dependence* atau teori ketergantungan sumber daya pemma yang mempunyai ketergantungan fiskal besar kepada pempus cenderung memiliki keleluasaan untuk tidak terlalu responsif terhadap TLRHP. Ketergantungan tersebut menurunkan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, karena keberlangsungan dana daerah tidak bergantung pada kinerja internal, melainkan pada alokasi dari pemerintah pusat. Ini beriringan pada perspektif *Agency Theory*, menyatakan bahwa ketidakseimbangan keterikatan pada prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) dapat menimbulkan *moral hazard*, di mana pemerintah daerah cenderung mengabaikan tindak lanjut jika tidak diikuti dengan kontrol atau insentif yang kuat. Jadi tingginya ketergantungan fiskal, membuat rendah tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil.

Riset ini selaras bersama riset dari Lestari & Lestari (2022), dimana menemukan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif signifikan pada tindak lanjut BPK. Artinya, semakin tinggi ketergantungan suatu daerah dengan dana atau kebijakan pusat, semakin rendah tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil BPK. Sebagai indikator, tindak lanjut penting dalam menganalisis kualitas tata kelola di daerah. hasil ini menunjukkan bahwa kurangnya kemandirian fiskal memengaruhi kecepatan dan konsistensi dalam pelaksanaan rekomendasi audit.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap TLRHP Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Dapat diketahui jika dugaan 4 (H4) ditolak dan dugaan 0 (H0) diterima. Artinya belanja daerah tidak berdampak signifikan TLRHP Pada Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera.

Teori *Recourse Based View* yang dicetuskan oleh Wernerfelt (1984) , menyatakan bahwa ketersediaan sumberdaya seperti belanja daerah tidak otomatis menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi, tetapi bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara strategis dan efektif. Sumber daya akan memberikan manfaat jika didukung oleh kemampuan internal yang memadai seperti sistem pengawasan, pengendalian internal, kualitas SDM dan komitmen kepemimpinan. Belanja daerah adalah *resouce* yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan TLRHP adalah *outcome* dari bagaimana anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kelemahan tata kelola yang ditemukan dalam audit.

Rekapitulasi data pada belanja daerah yang di ambil dari realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa masing-masing pemprov Pulau Sumatera pada tahun 2019-2023 memiliki persentase rata-rata 91,57 %. Hasil ini konsisten dengan riset Sundari & Prameti (2025) yang tidak menemukan hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pandangan audit atau pelaksanaan rekomendasi audit. Dapat ditafsirkan bahwa tingkat pelaksanaan tindak lanjut tidak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Artinya belanja daerah hanya dijelaskan untuk menyerap anggaran demi kepatuhan prosedural, bukan untuk menindaklanjuti rekomendasi audit secara substansial. Hal ini memperkuat pandangan teoritis dari *Resource-Based View* dan *Institutional Theory* bahwa kinerja tata kelola tidak ditentukan oleh jumlah anggaran semata, melainkan oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara strategis.

Pengaruh Temuan Audit, Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah Terhadap TLRHP Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Berlandaskan hasil uji F (uji simultan Variabel temuan audit, ketergantungan pada pempus, serta belanja daerah secara simultan berdampak pada tindak lanjut rekomendasi hasil Pemprov Pulau Sumatra. Perolehan ini relevan dengan temuan oleh Imtinan & Hasibuan (2021) menyebutkan jika temuan audit memiliki dampak positif signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil. Ini menjabarkan jika setiap penyimpangan atau kelemahan yang tercermin dalam temuan audit menjadi pemicu bagi kementerian atau lembaga untuk segera menindaklanjuti rekomendasi auditor (Ghanniya, 2023). Ketergantungan fiskal tinggi terhadap pemerintah pusat memiliki efek negatif signifikan terhadap pelaksanaan TLRHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun temuan audit ada, tanpa tekanan fiskal lokal, tindak lanjut rekomendasi tidak dijalankan serius, sehingga mengganggu akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pamungkas & Prasetyo (2019) menyebutkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran aturan atau efektivitas internal kontrol. Dalam konteks ini, jika besarnya belanja daerah tidak mengurangi pelanggaran atau pengendalian, maka belanja juga tidak menjamin terlaksananya tindak rekomendasi audit.

SIMPULAN

Hasil penelitian dari data yang telah diuji membuktikan bahwa temuan audit memiliki dampak positif dan substansial terhadap TLRHP BPK RI untuk pemerintah provinsi Pulau Sumatera tahun 2019-2023. TLRHP, di sisi lain, secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh ketergantungan pada pemerintah pusat, tetapi tidak banyak dipengaruhi oleh belanja daerah. Meskipun belanja daerah meningkat, hal tersebut belum cukup kuat memengaruhi ting-

kat penyelesaian rekomendasi. Sementara itu, hasil uji F menampilkan jika ketiga variabel secara simultan berdampak signifikan terhadap tindak rekomendasi hasil pemeriksaan. Artinya, kombinasi temuan audit, ketergantungan pada pusat, dan belanja daerah secara simultan memengaruhi penyelesaian rekomendasi BPK RI di provinsi Sumatera selama periode penelitian.

Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera diharapkan mampu memanfaatkan setiap temuan audit sebagai acuan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan. Perlu ditingkatkan kemandirian fiskalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, efisiensi belanja, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Keterbatasan peneliti yaitu hanya menggunakan variabel temuan audit, ketergantungan pada pempus, dan belanja daerah menjadi dalam risetnya, diharapkan pada riset berikutnya menggunakan variabel yang lebih kompleks supaya lebih mendalami pemahaman tentang berbagai faktor pengaruh TLRHP BPK dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan akuntabilitas di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. A. (2022) . *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Artha, S., Dewata, E., & Nurhasanah, S. (2024) . Determinants Of Factors Influenced The Follow-up Of BPK RI Audit. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1) , 2020-2046.
- Black, K., & Kan, M. (2019) . *Business statistics: For contemporary decision making (9th ed.)* . Hoboken: Wiley.
- Deswira, A. (2024) . Analysis of Regional Financial Management Performance and Level of Regional Independence: Case Study of The Regional Financial Agency of Tanah Datar Regency. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 12(1) , 74-90.
- Ghanniya, Y. H. (2023) . *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, I. (2018) . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2021) . *Dasar-dasar ekonometrika (edisi terbaru, versi terjemahan)* . Salemba Empat.
- Harlin, A., Nadirsyah, & Meutia, R. (2023) . Factors Affecting the Level of Implementation of Follow-Up Recommendations from the Audit Board in Local Governments in Aceh

- Province. *International Journal Of Social Health*, 2(9) , 586-594.
- Imtinan , A., & Hasibuan, F. (2021) . *Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada kementerian Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan Bogor Disclosure Level of Financial Statement*. Bogor: Bogor Disclosure Level of Financial Statement,.
- Iqbal, M. (2015) . *Sarana Tukar Menukar Informasi dan Pemikiran Dosen*. Diambil kembali dari Dosen Perbanas: https://dosen.perbanas.id/author/muhammad-iqbal/?utm_source=chatgpt.com
- Kusuma, P. M., & Kurnasih, L. (2024) . The Influence of Audit Opinions and Regional Government Characteristics on Regency/City Government Performance in Indonesia. *Jurnal EQUITY*, 10(2) , 51-66.
- Kusumarini, K. Y., & Respati, N. W. (2022) . Determinants of the level of completion following up recommendations on the audit results of BPK RI to local governments. *SIMAK: Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi*, 20(2) , 273-286. doi:<https://doi.org/10.35129/simak.v20i02.373>
- Lestari, M. M., & Lestari, T. (2022) . Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4) , 3553-3565.
- Mega, M., & Saring, S. (2025) . actors Affecting The Financial Performance of Local Government Antecedents in Indonesia. *International Business and Accounting Research Journal*, 12(4) , 231-248.
- Pamungkas, H., & Prasetyo, A. (2019) . Pengaruh belanja daerah terhadap pelanggaran aturan dan efektivitas kontrol internal. *urnal Administrasi Publik*, 20(4) , 123-136.
- Puspitasari, P. S., & Ratmono, D. (2017) . Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1) , 162-176. doi:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18270>
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020) . Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* , 5(4) , 497-505. doi:<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.15851>
- Sugiyono. (2019) . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Sundari, M., & Prameti, T. (2025) . Hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dan rekomendasi audit. *Journal of Public Finance*, 12(3) , 123-134.